BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi yang semakin intensif, persaingan antarwilayah tidak lagi terbatas pada skala nasional, melainkan telah berkembang menjadi fenomena antardaerah yang bersifat struktural. Wilayah yang mampu memanfaatkan sumber daya secara efisien akan memiliki keunggulan dalam menarik investasi, menciptakan lapangan kerja produktif, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, *Total Factor Productivity* (TFP) menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, karena perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antarwilayah bahkan di dalam satu negara sebagian besar dapat dijelaskan oleh perbedaan TFP antarwilayah tersebut (Beugelsdijk et al., 2018).

Teori pertumbuhan neoklasik menjelaskan bahwa pertumbuhan output tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh akumulasi modal dan peningkatan jumlah tenaga kerja (Solow, 1957). Komponen yang tidak terjelaskan oleh kedua faktor tersebut dikenal sebagai *Total Factor Productivity* (TFP), yang mencerminkan efisiensi penggunaan seluruh faktor produksi secara simultan. Berbeda dengan indikator parsial seperti PDRB per kapita yang hanya mengukur besaran output, atau produktivitas tenaga kerja yang hanya menangkap satu dimensi efisiensi, TFP mampu mencerminkan sejauh mana teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas kelembagaan bersinergi dalam proses produksi. Oleh karena itu, TFP dipandang sebagai indikator yang lebih komprehensif dibandingkan ukuran parsial

lainnya dalam merepresentasikan efisiensi pemanfaatan faktor produksi suatu wilayah.

Pentingnya efisiensi sebagai fondasi pertumbuhan produktivitas juga banyak ditekankan dalam literatur ekonomi pembangunan. Efisiensi penggunaan faktor produksi dipandang sebagai prasyarat bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan

yang hanya bersumber dari penambahan input akan mengalami titik jenuh seiring berjalannya waktu (Krugman, 1994). Lebih lanjut, peningkatan efisiensi merupakan jalur utama bagi wilayah untuk keluar dari jebakan pertumbuhan berbasis akumulasi semata, menuju pertumbuhan yang didorong oleh produktivitas dan inovasi (Easterly, 2001). Dengan demikian, wilayah yang ingin mempertahankan pertumbuhan TFP-nya dalam jangka panjang dituntut untuk terus meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksinya, bukan hanya menambah jumlah modal dan tenaga kerja yang digunakan.

Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan salah satu basis industri terkuat di Indonesia, menyimpan dinamika ekonomi yang kompleks. Selama periode 2018–2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menunjukkan pola yang fluktuatif. Pertumbuhan yang sempat mencapai 6,85 persen pada 2019 jatuh tajam menjadi 2,45 persen pada 2020 akibat pandemi (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025).

Di sisi lain, nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) justru menunjukkan tren yang secara umum meningkat, dari Rp. 352.312,42 miliar pada 2018 menjadi Rp. 435.547,55 miliar pada 2025 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025). Nilai PMTB sempat menurun menjadi Rp. 336.213,72 miliar pada 2020 akibat pandemi, namun kembali meningkat secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai Rp. 413.661,87 miliar pada 2024 dan Rp. 435.547,55 miliar pada 2025 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025). Kesenjangan antara akumulasi modal yang terus tumbuh dengan laju pertumbuhan ekonomi yang justru melambat mengindikasikan adanya persoalan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi yang tercermin dari lemahnya pertumbuhan TFP.

Dari sisi tenaga kerja, Jawa Barat mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,74 persen pada 2025 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025). Ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah besar belum sepenuhnya terkonversi menjadi output produktif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan tenaga kerja belum berjalan secara efisien,

sehingga potensi pertumbuhan TFP yang bersumber dari faktor tenaga kerja pun terhambat. Dengan demikian, persoalan di Jawa Barat bukan semata-mata persoalan ketersediaan sumber daya, melainkan persoalan efisiensi pemanfaatannya sebuah kondisi yang justru menegaskan relevansi pendekatan TFP berbasis modal (PMTB) dan tenaga kerja (angkatan kerja) untuk melihat seberapa efisien kedua faktor tersebut dimanfaatkan di Jawa Barat.

Beberapa kajian empiris telah mencoba mengukur kinerja TFP di Jawa Barat pada berbagai tingkatan. Pada tingkat subsektor, penelitian terhadap industri makanan, minuman, dan tembakau di Jawa Barat periode 2002–2013 menunjukkan rata-rata pertumbuhan TFP sebesar 2,751 persen per tahun, meskipun dengan volatilitas yang cukup tinggi antartahun (Juswadi, 2019)

Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan TFP Subsektor Makanan, Minuman, dan Tembakau di Provinsi Jawa Barat (%)

Tahun	TFP
2002	20,442
2003	-20,759
2004	6,955
2005	30,275
2006	-6,576
2007	25,221
2008	-51,500
2009	-18,946
2010	39,648

Sumber: (Juswadi, 2019).

Rata-rata TFP periode 2002–2013 sebesar 2,751, yang menunjukkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang relatif tinggi, meskipun terjadi volatilitas yang cukup besar pada beberapa tahun tertentu. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa efisiensi produksi pada subsektor ini sangat dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan input, khususnya tenaga kerja dan biaya produksi.

Pada tingkat yang lebih luas, kajian mengenai industri pengolahan di Kawasan Barat Indonesia periode 2011–2019 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki nilai TFP tertinggi dibandingkan Jawa Timur dan Jawa Tengah (Agustien Wahyuningsih & Budyanra, 2011). Temuan ini menunjukkan bahwa secara relatif Jawa Barat memiliki tingkat efisiensi pemanfaatan teknologi dan faktor produksi yang lebih baik dibandingkan provinsi lain di kawasan tersebut.

Tabel 1. 2 Data Nilai TFP Industri Pengolahan di Kawasan Barat Indonesia (2011–2019)

Tahun	Jawa Barat	Jawa Timur	Jawa Tengah
2011	3.920,12	3.249,91	2.947,83
2012	3.785,58	3.748,76	2.832,95
2013	3.941,34	3.519,57	2.856,88
2014	3.206,51	3.224,20	2.843,66
2015	2.998,37	2.837,73	2.581,91
2016	3.229,30	3.188,64	2.749,00
2017	3.674,05	3.340,83	3.169,75
2018	3.768,38	3.690,28	3.156,60
2019	3.837,00	3.635,33	2.956,80

Sumber: (Agustien Wahyuningsih & Budyanra, 2022).

Selain kajian sektoral makanan, minuman, dan tembakau serta industri pengolahan tersebut, penelitian mengenai konvergensi *Total Factor Productivity* (TFP) antarprovinsi di Indonesia periode 2011–2017 juga menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan produktivitas yang relatif positif, namun cenderung melambat (Purwono et al., 2021). Nilai TFP yang lebih besar dari satu menunjukkan adanya pertumbuhan efisiensi faktor produksi, namun kecenderungan penurunan pada sub-periode akhir mengindikasikan bahwa peningkatan produktivitas belum berlangsung secara stabil.

Tabel 1. 3 Konvergensi Total Factor Productivity (TFP) Antarprovinsi di Indonesia Tahun 2011–2017

Tahun	Konvergensi TFP Jawa Barat
2012-2013	1.033
2015-2017	1.014
2011-2017	1.011

Sumber: (Purwono et al., 2021).

TFP Jawa Barat secara umum terbilang relatif baik dibanding provinsi lain, namun bersifat fluktuatif dan belum stabil. Kondisi ini menyiratkan adanya potensi besar yang belum termanfaatkan secara optimal: apabila fluktuasi tersebut dapat dikendalikan dan tren TFP diarahkan menjadi semakin stabil serta terus meningkat dari tahun ke tahun, maka *Total Factor Productivity* di Provinsi Jawa Barat akan semakin kokoh. Harapan akan tercapainya stabilitas dan peningkatan TFP inilah yang mendasari perlunya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa yang sesungguhnya menyebabkan fluktuasi tersebut, sehingga kebijakan yang tepat dapat dirumuskan untuk mendorong TFP Jawa Barat ke arah yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Salah satu faktor yang diduga turut menjelaskan fluktuasi dan variasi TFP tersebut adalah heterogenitas struktur ekonomi yang sangat tinggi di antara 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Distribusi Sektor PDRB ADHB Paling Besar di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2025

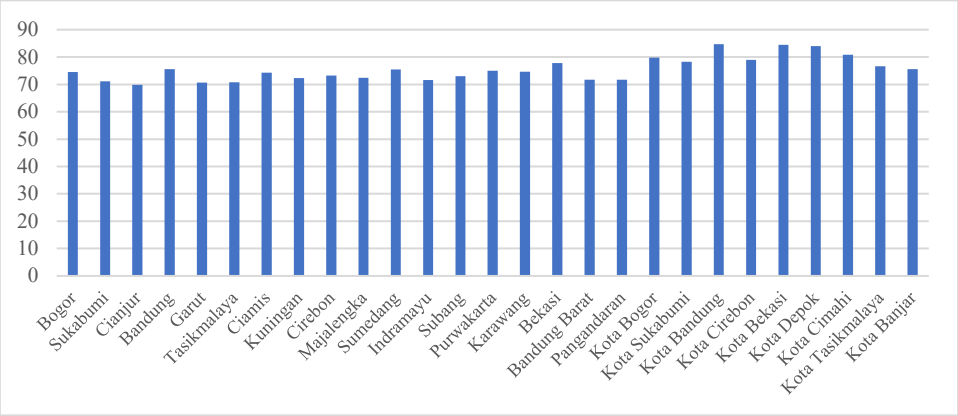
Kabupaten/ Kota	Distribusi Sektor PDRB ADHB Paling Besar 2025	Kontribusi (Persen)
Bogor	Industri Pengolahan	50,60
Sukabumi	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,58
Cianjur	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,76
Bandung	Industri Pengolahan	51,17
Garut	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	36,59
Tasikmalaya	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,89
Ciamis	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,76
Kuningan	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,42
Cirebon	Industri Pengolahan	20,06
Majalengka	Industri Pengolahan	26,98

Kabupaten/ Kota	Distribusi Sektor PDRB ADHB Paling Besar 2025	Kontribusi (Persen)
Sumedang	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,27
Indramayu	Industri Pengolahan	41,76
Subang	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,08
Purwakarta	Industri Pengolahan	56,32
Karawang	Industri Pengolahan	68,03
Bekasi	Industri Pengolahan	76,33
Bandung Barat	Industri Pengolahan	40,39
Pangandaran	Pertanian, Kehutanan, danPerikanan	26,97
Kota Bogor	Industri Pengolahan	17,79
Kota Sukabumi	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	36,42
Kota Bandung	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,07
Kota Cirebon	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,38
Kota Bekasi	Industri Pengolahan	32,45
Kota Depok	Industri Pengolahan	28,34
Kota Cimahi	Industri Pengolahan	43,58
Kota Tasikmalaya	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,69
Kota Banjar	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

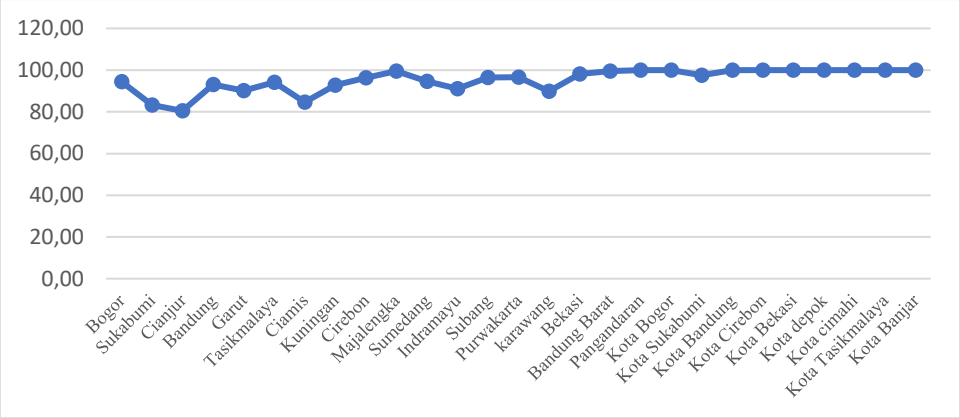
Data distribusi PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan dominasi sektor yang cukup tajam antarwilayah. Kabupaten Bekasi tercatat sebagai wilayah dengan dominasi sektor tertinggi, yaitu industri pengolahan yang berkontribusi hingga 76,33 persen terhadap PDRB, diikuti Kabupaten Karawang sebesar 68,03 persen dan Kabupaten Purwakarta sebesar 56,32 persen. Sebaliknya, sejumlah kabupaten seperti Tasikmalaya (38,89 persen), Garut (36,59 persen), dan Cianjur (31,76 persen) masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sementara itu, pola yang berbeda terlihat pada wilayah perkotaan: Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sedangkan Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi justru masih didominasi oleh sektor industri pengolahan. Perbedaan dominasi sektor ini menunjukkan tingginya

heterogenitas struktur ekonomi antarwilayah di Provinsi Jawa Barat, yang pada gilirannya diduga turut membentuk perbedaan kapasitas produktivitas (TFP) masing-masing wilayah.



Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2025
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Selain struktur sektor, kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan infrastruktur juga menunjukkan disparitas yang signifikan antarwilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Jawa Barat pada 2025 berkisar antara 69,84 di Kabupaten Cianjur hingga 84,66 di Kota Bandung, mencerminkan kesenjangan kapabilitas sumber daya manusia yang masih cukup besar antarwilayah. Wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, Kota Bekasi (84,43), dan Kota Depok (84,04) secara konsisten menempati posisi IPM tertinggi, sementara kabupaten yang masih berbasis pertanian seperti Cianjur, Garut (70,67), dan Tasikmalaya (70,76) berada pada kisaran terendah. Pola ini menunjukkan bahwa kesenjangan kualitas sumber daya manusia antara kawasan perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat masih relatif lebar



Gambar 1. 2 Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi di Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025.

Dari sisi infrastruktur, persentase kemantapan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada kabupaten/kota tahun 2025 menunjukkan variasi antarwilayah. Tingkat kemantapan jalan terendah terdapat di Kabupaten Cianjur sebesar 80,46 persen, sedangkan beberapa wilayah mencapai tingkat kemantapan jalan sebesar 100,00 persen, yaitu Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Sementara itu, beberapa kabupaten lainnya memiliki tingkat kemantapan jalan yang relatif tinggi, seperti Kabupaten Majalengka sebesar 99,61 persen, Kabupaten Bandung Barat sebesar 99,59 persen, dan Kabupaten Bekasi sebesar 98,11 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemantapan jalan antarwilayah di Jawa Barat relatif tinggi, tetapi masih terdapat perbedaan kualitas infrastruktur jalan antarkabupaten/kota. Perbedaan kondisi infrastruktur tersebut dapat berkaitan dengan perbedaan efisiensi penggunaan faktor produksi antarwilayah yang tercermin dalam variasi Total Factor Productivity (TFP).

Secara empiris, masing-masing faktor tersebut telah terbukti berpengaruh terhadap TFP maupun produktivitas wilayah pada berbagai konteks penelitian. Kualitas sumber daya manusia yang diproksikan dengan IPM ditemukan berpengaruh positif terhadap TFP (Kijek & Kijek, 2020; Maitisa et al., 2025). infrastruktur juga terbukti berkontribusi terhadap

peningkatan produktivitas melalui penurunan biaya transaksi, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta efisiensi aktivitas ekonomi (Beugelsdijk et al., 2018). Sementara itu, struktur sektoral wilayah turut menjelaskan variasi TFP antarwilayah (Ye et al., 2022). Namun, ketiga faktor tersebut umumnya dikaji secara terpisah, belum diintegrasikan dalam satu kerangka analisis simultan pada level kabupaten/kota.

Meskipun kajian mengenai TFP, sektor basis, IPM, dan infrastruktur telah cukup berkembang dalam literatur ekonomi regional, terdapat kesenjangan yang belum terisi. Pertama, sebagian besar penelitian TFP di Indonesia masih dilakukan pada level nasional atau provinsi, belum menyentuh level kabupaten/kota secara komprehensif. Kedua, penelitian yang ada umumnya hanya mengkaji satu atau dua faktor penjelas secara terpisah, belum mengintegrasikan sektor basis, IPM, dan infrastruktur dalam satu model analisis simultan. Ketiga, keterkaitan antara struktur sektor basis yang diidentifikasi melalui pendekatan *Location Quotient* (LQ) dengan *Total Factor Productivity* (TFP) di level kab/kota belum pernah dianalisis secara eksplisit dalam kerangka data panel di Jawa Barat. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan utama penelitian ini.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat posisi strategis Jawa Barat dalam perekonomian nasional. Jawa Barat menyumbang sekitar 13 persen terhadap PDB nasional, namun sekaligus menanggung beban pengangguran tertinggi di Indonesia dan menghadapi tekanan transformasi struktural yang belum merata antarwilayah. Dalam konteks kebijakan, pemahaman mengenai faktor-faktor yang secara nyata memengaruhi efisiensi ekonomi di level kab/kota menjadi sangat relevan baik untuk merancang kebijakan investasi yang tepat sasaran, maupun untuk memperkuat daya saing wilayah secara berkelanjutan dan stabil. Tanpa pemetaan yang berbasis bukti, potensi heterogenitas struktural Jawa Barat berisiko menjadi sumber ketimpangan yang melebar, bukan sebagai kekuatan komplementer yang saling menopang.

Berdasarkan fenomena empiris dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaruh sektor basis, kualitas sumber daya manusia (IPM), dan infrastruktur terhadap *Total Factor Productivity* (TFP) pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2025, menggunakan pendekatan regresi data panel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan research gap yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Total Factor Productivity* (TFP) di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2025?
2. Sektor apa saja yang menjadi sektor basis di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang diukur menggunakan pendekatan *Location Quotient* (LQ)?
3. Bagaimana pengaruh sektor basis, kualitas sumber daya manusia (IPM), dan infrastruktur *Total Factor Productivity* TFP pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis *Total Factor Productivity* (TFP) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2018–2025.
2. Mengidentifikasi apa saja Sektor Basis pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat diukur menggunakan pendekatan *Location Quotient* (LQ).
3. Menganalisis pengaruh sektor basis, kualitas sumber daya manusia (IPM), dan infrastruktur *Total Factor Productivity* (TFP) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi regional, khususnya terkait analisis Total Factor Productivity (TFP) sebagai ukuran efisiensi penggunaan faktor produksi pada tingkat kabupaten/kota. Pendekatan ini menawarkan cara yang lebih komprehensif dalam mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan indikator parsial, karena TFP mampu menangkap efisiensi kombinasi modal dan tenaga kerja secara simultan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur empiris mengenai keterkaitan antara struktur sektor basis, kualitas sumber daya manusia, dan ketersediaan infrastruktur terhadap variasi TFP antarwilayah dalam satu kerangka analisis data panel.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan mengenai pengaruh sektor basis, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan infrastruktur terhadap *Total Factor Productivity* (TFP) diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan output, tetapi juga pada peningkatan efisiensi dan produktivitas wilayah. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam menentukan prioritas pengembangan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan infrastruktur yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji Total Factor Productivity dengan
metode regresi data panel.